



KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

RENCANA KERJA 2026

**BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
WILAYAH XV**



MAKASSAR



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

NOMOR : SK. 25/BPHL-XV/REN.03.05/TU/12/2025

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI PENGELOLAAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2026 telah ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana huruf a perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 dengan keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.
- Mengingat : 1. Undang-undang Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025 2029;

10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV tentang Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2026
- KESATU : Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 disusun sebagai acuan bagi :
- a. Pelaksanaan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
 - b. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Desember 2025



KEPALA BALAI

MUCHKSIN
NIP. 19740727 200003 1 003

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV
NOMOR : SK. 25/BPHL-XV/REN.03.05/TU/12/2025
TENTANG
RENCANA KERJA BALAI PENGELOLAAN LESTARI WILAYAH XV
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai dengan yang diharapkan.

Dokumen Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV merupakan salah satu implementasi dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2026. Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan Tahun 2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2026. Rencana Kerja ini menjadi pegangan dalam menjalankan komitmen dan mencapai target kinerja tahunan.

Semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Dukungan Manajemen Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.

Makassar, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Muchksin, S.Hut., M.Si
NIP. 197407272000031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	8
A. CAPAIAN KINERJA BPHL WILAYAH XV TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025	8
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025 23	
III. RENCANA KERJA TAHUN 2026	29
A. STRATEGI Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026	29
B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2026	31
IV. PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XIII	6
2. Matriks Cascading Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024	8
3. Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2024.....	9
4. Prognosis Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XV Tahun 2025	14
5. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	24
6. Prognosis Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XV Tahun 2025	25
7. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2026	32
8. Matriks Pemetaan Peran (<i>Crosscutting</i>) dalam Pencapaian Kinerja BPHL Wilayah XV	34
9. Matriks Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2026	38
10. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XV Tahun 2026	44

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar/Diagram</i>	<i>Halaman</i>
1. Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Lestari	2
2. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	5
3. Sebaran Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	7
4. Prioritas Nasional 2025-2029	30
5. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari	31
6. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL	33
7. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL	34
8. Pohon Kinerja BPHL Wilayah XV Tahun 2026	43

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kehutanan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan hutan sebagai penyangga kehidupan, penguatan ekonomi rakyat dan perekonomian nasional yang disertai peningkatan partisipasi masyarakat. Dinamika pembangunan hutan lestari menghadapi tantangan dalam pencapaian target-target pembangunan sektor kehutanan. Tantangan yang dihadapi seperti tingginya deforestasi dan degradasi akibat alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan konflik tenurial.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan pembangunan hutan lestari jangka lima tahunan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025-2029 difokuskan pada integrasi pengelolaan hutan berkelanjutan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, hilirisasi produk hutan dan peningkatan produksi hasil hutan serta peningkatan PNPB dan pemulihan ekosistem.

Pembangunan kehutanan pada Tahun 2026 berfokus dengan tema "Aktualisasi Hutan untuk Pangan, Energi dan Lingkungan. Dukungan penuh diprioritaskan pada rehabilitasi hutan dan lahan, penerapan *agroforestry*, pengamanan kawasan serta penertiban izin usaha kehutanan.

Arah kebijakan utama terkait rehabilitasi hutan dan lahan, pencegahan bencana, pengendalian kebakaran hutan, penertiban izin usaha kehutanan yang berkinerja buruk dan illegal. Selain itu pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan *agroforestry*, peningkatan produksi hasil hutan dan peningkatan kerjasama yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat langsung dari hutan baik secara ekologi maupun ekonomi tetapi dalam kendali yang bertanggungjawab.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghasilkan analisis strategis dalam bentuk matriks *SWOT* sehingga dapat membantu pengambilan langkah-langkah strategis pengelolaan hutan lestari terutama di wilayah kerja BPHL Wilayah XV. Matriks *SWOT* pengelolaan hutan lestari dapat dilihat pada Tabel 1.

Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Lestari

SWOT ANALYSIS

STRENGTHS

S

- Wilayah kerja yang terdiri dari 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
- Luas Kawasan Hutan Produksi 1.984.267 ha dan Hutan Lindung 2.658.873 ha
- Potensi sumberdaya Hutan Produksi dan Hutan Lindung meliputi hasil hutan kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan yang tinggi dan beragam jenis
- Sumberdaya Manusia baik personil BPHL, KPH dan GANISPH yang kompeten, profesional, berkinerja baik dan bertanggungjawab
- Terdapat regulasi/peraturan/kebijakan yang dapat menyederhanakan regulasi perizinan dan mendukung pengembangan usaha pengelolaan hutan
- Tersedianya basis teknologi dan Sistem Informasi (SI) yang terintegrasi yang mampu menjadi sarana dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan hasil hutan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan
- Terdapat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) yang memiliki potensi HHBK dan jasa lingkungan yang cukup tinggi dan beragam.

W

- Masih terdapat konflik tenurial dalam wilayah kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPB)
- Kurangnya pasokan bahan baku kayu bulat pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPBH), berdampak pada banyaknya PBPBH yang tidak beroperasi lagi
- Masih terdapat potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan yang belum dikembangkan, baik dari segi proses pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan hasil produksinya.
- Harga pasar HHBK pada umumnya masih bersifat fluktuatif dan cenderung belum menutupi biaya produksi dan pengangkutan
- SDM GANISPH masih ada yang belum memiliki kompetensi yang memadai
- Masih terdapat KPH belum didukung SDM kelembagaan yang solid, sarana dan prasarana, pendanaan yang memadai
- Masih terdapat pemegang PPPS yang memiliki akun SI-PUHH dan SI-PNBP
- Belum selarasnya Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disusun dengan pelaksanaan kegiatan
- Daya saing produk kehutanan yang masih rendah

SWOT ANALYSIS

OPPORTUNITIES

O

- Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sangat besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan
- Peningkatan nilai tambah produk hasil hutan melalui pengembangan teknologi
- Pengembangan bisnis hijau terkait kredit karbon, penyerapan dan emisi karbon
- Peningkatan pendapatan negara dan daerah melalui pengembangan usaha dibidang kehutanan yang dikelola dan bermanfaat langsung bagi masyarakat lokal
- Implementasi multiusaha dalam peningkatan mutu dan peluang dalam pengelolaan hutan

T

THREATS

- Perubahan iklim yang berakibat pada ekosistem, suhu ekstrem, cuaca yang tidak menentu
- Pengawasan terhadap deforestasi akibat pegelolaan hutan yang tidak bertanggungjawab
- Konflik tenurial yang masih berlangsung berdampak pada kepastian usaha pengelolaan hutan
- Kondisi pasar dan harga produk yang tidak pasti
- Implementasi SVLK yang memberikan jaminan dan peluang produk industri lokal diterima di pasar internasional
- Maraknya kegiatan non kehutanan yang mempengaruhi pengendalian kawasan hutan

Sejalan dengan sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2026, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menjalankan 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Arahannya program pengelolaan hutan berkelanjutan adalah sebagai berikut : (a) Penguasaan hutan yang berkeadilan (Penyelesaian sawit non prosedural dalam kawasan hutan, penerbitan/pencabutan izin pemanfaatan kawasan hutan, audit dan pemberlakuan sanksi); (b) Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan; (c) Pengoptimalan *agroforestry* dan mendukung diversifikasi pangan melalui pemanfaatan kawasan hutan; (d) Penertiban kawasan hutan, penanganan pasca pemertiban, penindakan tegas atas izin usaha yang tidak patuh maupun illegal; (e) Penerapan *One Map Policy* dan modernisasi layanan kehutanan untuk transparansi dan efisiensi dan (f) Peningkatan peran serta masyarakat adat dan lokal dalam penjagaan hutan serta pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan.

Program Dukungan Manajemen mendukung pencapaian sasaran program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sistem pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang jelas, teratur dan efektif dengan arahan sebagai berikut : (a) Peningkatan reformasi birokrasi melalui perencanaan dan penganggaran program yang berorientasi pada dampak; (b) Digilitasi layanan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Digilitasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan, digilitasi pembayaran non-tunai); (c) Pemenuhan pembayaran gaji; (d) Operasional perkantoran.

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun merujuk pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2026. Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 sebagai pegangan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yang sistematis, terukur dan adaptif.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari. yang berkedudukan di

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. BPHL Wilayah XV memiliki wilayah kerja 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV menyelenggarakan program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pengelolaan Hutan Lestari Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas Kepala Balai dibantu oleh Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas masing-masing struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
 2. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi PPPHPHL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan, usulan rencana pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi PEPHPHL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
 4. Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Adapun struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV adalah sebagai berikut :



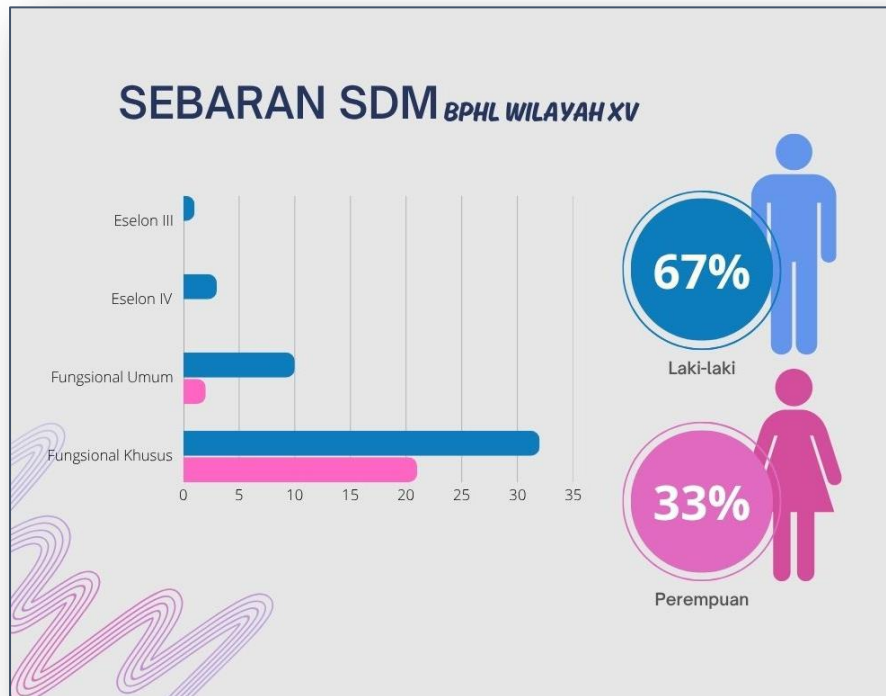
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV

Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang perempuan yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 (delapan belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti dalam Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XV

No.	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV												
1	Eselon III-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Khusus	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Jumlah		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Sub Bagian Tata Usaha												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	3	2	5	0	0	0	8	2	10
3	Fgs. Khusus	1	0	6	2	1	1	0	0	8	3	11
Jumlah		2	0	9	4	6	1	0	0	17	5	22
Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fgs. Khusus	2	0	6	8	2	2	0	0	10	10	20
Jumlah		2	0	7	8	2	2	0	0	11	10	21
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2	Fgs. Khusus	3	1	7	6	1	1	0	0	10	8	18
Jumlah		6	1	7	6	1	1	0	0	14	8	22
Total		15	1	23	11	1	4	0	0	46	23	70

SIMPEG Tahun 2025



Gambar 3. Sebaran Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

A. CAPAIAN KINERJA BPHL WILAYAH XV TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Tahun 2024 melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Balai Tahun 2020 - 2024. Keberhasilan kegiatan ini didasarkan atas pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditentukan selama kurun waktu 2020 - 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Cascading Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Program	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan
		2. T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	2. T2.S2.1.1.1 Jumlah Produksi Kayu Bulat
		3. T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	3. T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan
		4. T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	4. T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan
		5. T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	5. T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
2	Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Revisi RENSTRA DITJEN PHL 2020-2024

Tabel 3. Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Capaian Output		Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
A Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan												
1	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1. S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1 Meningkatkan luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1.1.1 Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (hektar) (Dit. PUPH)	Hektar					
					T1.S4.1.1.1.2 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	T1.S4.1.1.1.2.1 Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) (Dit. BRPH)	Juta Ha					
						T1.S4.1.1.1.2.2 KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH) (Dit.BRPH)	KPH	Fasilitas Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	2 Lembaga	2 Lembaga	399.195.000	399.152.779
						T1.S4.1.1.1.2.3 Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari (KPH) (Dit. BRPH)	KPH	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	2 Lembaga	222.061.000	222.061.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Capaian Output		Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.2.1 Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH)	Unit					
						T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Ton	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	4 Badan Usaha	5 Badan Usaha	461.635.000	461.428.163
						T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Unit	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	213.499.000	213.303.401
						T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	453.549.750

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Capaian Output		Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
						T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD	Fasilitasi Implementasi RKUPH/ RKTPH	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	239.134.000	238.881.665
3	T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1.1. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1.1. Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m ³	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	227.970.000	227.819.197
						Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya		11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	516.395.000	516.176.620	
					T2.S3.1.1.1.2. Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH)	Juta ton					
					T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	3 UMKM	3 UMKM	672.820.000	672.789.650		

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Capaian Output		Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
4	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Wajib Bayar	Pengawasan dan pengendalian PNBP pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	174.679.000	174.652.940
						T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Unit	Layanan iuran dan Penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	145.798.000	145.787.933
5	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Hektar	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	109.915.000	109.845.720

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Capaian Output		Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
B Program Dukungan Manajemen												
1	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Poin	Layanan Perkantoran	83 Poin	83 Poin	10.288.442.000	10.288.363.568
						T4.S2.1.1.1.2.2 Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Poin	Penilaian SPIP	3,5 Poin	3,7 Poin		
						T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Laporan	Layanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	149.311.000	149.308.634
							Unit	Layanan Sarana Internal	77 Unit	77 Unit	269.817.000	269.200.000
						Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	82,5 poin	82,5 poin	7.300.000	7.300.000

Untuk prognos capaian kinerja kegiatan dan prognosis capaian realisasi anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Prognosis Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XV Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
								Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
A Pengelolaan Hutan Berkelanjutan											
1	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (persen) (Dit. BRPH)	Persen	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	2 Lembaga	687.499.000	100
					Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (peta arahan) (Dit. BRPH)	Peta					
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (ribu hektar) (Dit. PUPH)	Ribu hektar	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	55.000.000	99.95
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung & produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai Transaksi Ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan Masyarakat	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (kelompok masyarakat) (Dit. PUPH)	Kelompok masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	258.740.000	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
								Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
3	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung & produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai Efisiensi Pemanfaatan Bahan Baku menjadi Kayu Olahan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (persen) (Dit. BPPHH)	Persen					
					Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (ribu ton) (Dit. BPPHH)	Ribu ton					
					Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (juta m ³) (Dit. BPPHH)	Juta m	Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	259.299..000	99.87
		Peningkatan Rasio Serapan Getah Pinus ke Industri Pengolahan Dalam Negeri	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik & pasar global	Jumlah Produksi gondorukem dan terptentin dari hasil hilirisasi getah pinus (ribu ton) (Dit. BPPHH)	Ribu ton					
		Nilai investasi sektor kehutanan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemanfaatan HP & HL dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (persen) (Dit. BUPH)	Persen	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	167.600.000	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
								Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
					Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (triliun rupiah) (Dit. BUPH)	Triliun Rupiah					
		Nilai Ekspor Produk Kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan & pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik & pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (juta ton) (Dit.BPPHH)	Juta ton	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	1 UMKM	1 UMKM	390.602.000	99.92
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (juta m ³) (Dit.PUPH)	Juta m ³	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	2 Badan usaha	2 badan Usaha	299.160.000	99.93
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	Ribu hektar	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	62.600.000	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)		
								Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)	
					Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	Ribu hektar	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	309.300.000	99.93	
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran dan PUHH Untuk Mendukung PNBPN dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (persen) (Dit. IPHH)	Persen						
					Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBPN (poin) (Dit. IPHH)	Poin						
					Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (persen) (Dit. IPHH)	Persen						

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
								Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
					Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Persen) (Dit.IPHH)	Persen	Pembinaan Pengendalian PUHH dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	617.000.000	99.95
B	Dukungan Manajemen										
1	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintah pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	Poin	Layanan Perkantoran	83 Poin	76 Poin	10.842.642.000	100
						Layanan	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	30.000.000	100
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	Poin	Layanan Umum	Poin	3,8 Poin	150.000.000	99.85
						Laporan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	100

Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka usaha pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dengan Rincian Output sebagai berikut :

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari terdiri dari Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan KPH dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan KPH dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari. Terkait Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan KPH dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Tahun 2025 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan : (1) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJPD lingkup KPH Provinsi Sulawesi Barat di Kota Makassar, Fasilitasi penyusunan RPHJP/RPHJPD di KPH Karossa Kab. Mamuju Tengah, KPH Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah, KPH Mamasa Barat Kab. Mamasa, KPH Tina Orima Kab. Bombana, KPH Karama Kab. Mamuju, KPH Bonehau Kalumpang Kab. Mamuju dan KPH Mapili Kab. Polman; (2) Kegiatan Monitoring Implementasi RPHJP/RPHJPD pada KPH Bialo Kab. Bantaeng, KPH Tangka Kab. Sinjai, KPH Bila Kab. Sidrap, KPH Sawitto Kab. Pinrang, KPH Awota Kab. Wajo, KPH Saddang I Kab. Tana Toraja dan KPH Kelara Kab. Jeneponto; (3) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Tata Hutan KPH di Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kegiatan bimbingan teknis penyusunan tata hutan di wilayah KPH antara lain KPH Gularaya Kab. Konawe Selatan, KPH Laiwoi Kab. Konawe, KPH Malunda Kab. Majene, KPH Mamasa Timur Kab. Mamasa, KPH Sarudu Kab. Pasangkayu dan KPH Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah. Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan KPH dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari telah dilaksanakan melalui (1) Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif, penilaian KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu KPH Selayar Kab. Selayar, KPH Bialo Kab. Bantaeng dan KPH Baliase Kab. Luwu Utara; (2) Kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka Review Rencana Pengelolaan Hutan KPH mendukung KPH efektif dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Rincian Output : Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha Tahun 2025 terdiri dari kegiatan : (1) Pembinaan teknis/fasilitasi pengajuan PBPH pada KPH Laiwoi Barat Kabupaten Konawe, KPH Mapili Kabupaten Polman, KPH Cenrana Kabupaten Bone, KPH Ulubila Kabupaten

Bone dan KPH Rongkong Kabupaten Luwu Utara; (2) Penyusunan Koordinat Geografis pada PT. Cahaya Rimba Nusantara Kab. Toraja Utara, PT. Arbora Lestari Nusantara Kab. Tana Toraja, Soppeng, Bone, Maros, Sinjai dan PT. Lumina Flora Nusanta Kab. Tana Toraja, Barru, Soppeng, Gowa, dan Maros; dan (3) Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Prakondisi Pengelolaan Hutan Skema PBPH yang dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi

Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi dilaksanakan dengan (1) Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan oleh PBPH di wilayah kerja PBPH PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa, PT. Inhutani I Kabupaten Gowa, PT. Sumber Alam Pertiwi Kabupaten Maros, PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa dan PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna. Untuk mengetahui potensi konflik serta merumuskan upaya-upaya penyelesaian konflik khususnya di wilayah kerja PBPH/calon areal PBPH maka dilaksanakan kegiatan Identifikasi/Pemetaan Konflik pada 7 (tujuh) lokasi KTH di wilayah PBPH/calon areal PBPH di Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Muna. Dan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik (*best practices*) mengenai model pengelolaan hutan berbasis ekowisata yang mampu mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan kegiatan study banding implementasi ekowisata pada Blangsinga *Waterfall* di Kab. Gianyar dan Hutan Bambu di Kab. Bangli Provinsi Bali.

Rincian Output : Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan multiusaha kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV antara lain pada Kabupaten Kabupaten Gowa, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Muna.

Rincian Output : Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha salah satunya adalah untuk mencapai pengelolaan produksi hasil hutan kayu yang legal, efisien, transparan dan berkelanjutan baik dari kawasan hutan produksi maupun dari areal Penggunaan Hak Atas Tanah. Tahun 2025 BPHL Wilayah XV melaksanakan melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu antara lain pada Kabupaten Mamuju, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Maros. Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu pada PT. Seleraya Agri Kab. Muna, KTH awonio Jaya Kab. Konawe Selatan, KTH Berkah Tani Sejahtera Kab. Luwu Timur, PT. Sumber Alam Pertiwi Kab. Maros.

Rincian Output : Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha khususnya pada produksi hasil hutan bukan kayu untuk mendukung peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Tahun 2025 BPHL Wilayah XV melaksanakan melalui Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain pada Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Kolaka Timur. Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Getah Pinus dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang dan Kota Bau-Bau.

Rincian Output : Penanaman Hutan oleh PBPH/ Hak Pengelolaan

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha pada Kegiatan Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman pada PBPH/Hak Pengelolaan pada PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna, PT. Inhutani I Kabupaten Gowa, PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa dan KSU Jaya Abdi JKabupaten Gowa.

Rincian Output : Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil hutan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan, penatausahaan dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan agar usaha pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan dapat

terlaksana secara efektif dan efisien serta kewajiban terkait iuran kehutanan terpenuhi. Tahun 2025, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan pada Wajib Bayar (WB) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV yaitu PT. Inhutani Kabupaten Tana Toraja, PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa dan PT. Inhurtani I Kabupaten Gowa. Dilaksanakan juga pemantauan pemenuhan PNBP terkait piutang PSDH/DR di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.

Rincian Output : Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Hilirisasi Industri Pengolahan hasil Hutan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Peningkatan Produksi/Kinerja Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan Menengah dan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Produksi/Kinerja Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui (1) Kegiatan fasilitasi/pendampingan usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Mamuju; (2) Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi/Kinerja Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan Menengah di Kota Parepare. Untuk Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan PBPHH skala kecil dan menengah dan harga pasar di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Timur, Kota Bau-Bau, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Makassar.

Rincian Output : UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL

Fasilitasi dan pembinaan UMKM Tahun 2025 dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain : (1) Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan di wilayah kerja BPHL Wilayah XV di yaitu pada Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Majene dan kabupaten Mamasa; (2) Penilikan SVLK pada UD. Wahyu Meubel di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara; (3) Sosialisasi Peraturan SVLK di 4 (empat) lokasi pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV yaitu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Polman dan Kabupaten Pasang Kayu di Provinsi Sulawesi Barat dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Rincian Output : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Target Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar 76 Poin dan untuk target pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah yaitu 76 poin. Tahun 2025 penilaian mandiri SAKIP pun di lakukan pada BPHL Wilayah XV dengan nilai 87,86 poin. Dalam rangka implementasi SAKIP pada BPHL Wilayah XV ditempuh beberapa langkah yaitu : (1) Meningkatkan pemahaman mengenai implementasi SAKIP lingkup BPHL Wilayah XV; (2) Melaksanakan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada e-SAKIP; (3) Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025 lingkup Kementerian Kehutanan.

Rincian Output : Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Penyelenggaraan SPIP lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan beberapa tahap kegiatan antara lain : (1) Penyusunan Surat Keputusan Satuan Pelaksana dan Satuan Tugas SPIP yang telah disesuaikan dengan nomenklatur Kemenhut; (2) Penyusunan Rencana Pengendalian Intern lingkup BPHL Wilayah XV; (3) Mengikuti Workshop Manajemen Resiko; (4) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 dengan perolehan nilai Maturitas BPHL Wilayah XV sebesar 4.18 poin pada Level 4 (Terkelola).

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PROGNOSIS TAHUN 2025

Capaian Serapan Tahun Anggaran Kegiatan Tahun 2024

Capaian serapan anggaran kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian serapan anggaran kegiatan pada Tahun 2024 sampai Bulan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Anggaran (Rupiah)				Realisasi	(%)
		Pagu dengan Blokir	Blokir	Target tanpa Blokir			
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	855.334.000	234.078.000	621.256.000	621.948.065	99.99	
6729.BDB.001	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	414.612.000	15.417.000	399.195.000	399.152.779	99.99	
6729.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	440.722.000	218.661.000	222.061.000	222.055.786	100	
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6730.BIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.024.578.000	395.000	1.024.183.000	1,023.458.949	99.93	
6731.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berkas Kelompok Tani Hutan	109.915.000	0	109.915.000	109.845.720	99.94	
6731.BDH.002	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	213.499.000	0	213.499.000	213.303.401	99.91	
6731.QAC.002	Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	239.211.000	77.000	239.134.000	238.881.665	99.89	
6731.QIH.001	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	461.953.000	318.000	461.635.000	461.428.163	99.96	
6732	Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	384.077.000	63.600.000	320.477.000	320.440.873	99.99	
6732.BDH.002	Layanan luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	146.599.000	801.000	145.798.000	145.787.933	99.99	
6732.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	237.478.000	62.799.000	174.679.000	174.652.940	99.99	
6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1.562.333.000	145.148.000	1.417.185.000	1.416.785.467	99.97	
6733.BDH.002	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	368.463.000	140.493.000	227.970.000	227.819.197	99.93	
6733.QDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	673.000.000	180.000	672.820.000	672.789.650	100	
6733.QIH.001	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	520.870.000	4.475.000	516.395.000	516.176.620	99.96	

029.03.WA. Program Dukungan Manajemen						
5396.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	10.467.760.000	30.007.000	10.437.753.000	10.437.672.202	100
5396.EBA.962	Layanan Umum	162.246.000	12.935.000	149.311.000	149.308.634	100
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.305.514.000	17.072.000	10.288.442.000	10.288.363.568	100
5396.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBB.951	Layanan Sarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
5396.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
Jumlah		15.054.385.000	502.808.000	14.551.577.000	14.549.615.806	99.99

Sumber : Laporan Kinerja BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

Prognosis Capaian Serapan Tahun Anggaran Kegiatan Tahun 2025

Capaian serapan anggaran kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Prognosis capaian serapan anggaran kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Prognosis Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XV Tahun 2025

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Anggaran (Rupiah)		(%)
		Pagu	Realisasi	
029.03.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
7279.BDB.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	687.499.000	687.490.900	100
7279.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	687.499.000	687.490.900	100
7280.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	167.600.000	167.598.616	100
7280.QIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	167.600.000	167.598.616	100
7281.BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	258.740.000	258.737.414	100

7281.BDH.001	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	258.740.000	258.737.414	100
7281.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	62.600.000	62.597.836	100
7281.QDH.003	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	62.600.000	62.597.836	100
7281.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	633.460.000	633.010.994	99.93
7281.QIH.001	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	299.160.000	298.944.853	99.93
7281.QIH.002	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	309.300.000	309.093.305	99.93
7281.QIH.003	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	55.000.000	54.972.836	99.95
7282.BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	617.000.000	616.707.884	99.95
7282.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian PNB Pemanfaatan Hutan & PUHH	617.000.000	616.707.884	99.95
7283.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	390.602.000	390.290.962	99.92
7283.BDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	390.602.000	390.290.962	99.92
7283.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	259.299.000	258.951.212	99.87
7283.QDH.001	Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	259.299.000	258.951.212	99.87
143.06. WA. Program Dukungan Manajemen				
7317.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.992.642.000	10.992.267.773	100
7317.EBA.962	Layanan Umum	150.000.000	149.779.862	99.85
7317.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.842.642.000	10.842.487.911	100
7317.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30.000.000	29.998.908	100
7317.EBB.951	Layanan Sarana Internal	30.000.000	29.998.908	100
7317.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	20.000.000	20.000.000	100
7317.EBD.953	Layanan Pemantauan Evaluasi	20.000.000	20.000.000	100
JUMLAH		14.149.442.000	14.147.652.499	

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV pada Tahun 2025 didukung dengan pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor DIPA-143.06.2.693529/2025 Tanggal 2 Desember 2024, dengan total anggaran sebesar Rp. 14.149.442.000,- (Empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya pagu anggaran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV pada Tahun 2025 mengalami beberapa revisi yang mengakibatkan adanya efisiensi dan perubahan jumlah pagu, yaitu antara lain :

1. Bulan Januari 2025, berdasarkan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Kehutanan yang membutuhkan penyesuaian organisasi, sistem dan penganggaran, pagu awal BPHL Wilayah XV pada masa transisi sebesar Rp. 10.441.601.000,- (Sepuluh milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus satu ribu rupiah) yang hanya terdiri dari pagu Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran;
2. Bulan Februari 2025, dilakukan efisiensi dengan menggunakan mekanisme blokir (bukan pemotongan langsung) sesuai dengan Memorandum Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor M.2/PHL/SPHL/REN.1/B/2/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Efisiensi Belanja APBN Ditjen PHL T.A 2025. Pagu anggaran BPHL Wilayah XV sebesar Rp. 14.293.404.000,- (Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu rupiah) diblokir sebesar Rp 2.609.455.000,- (Dua milyar enam ratus sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu tanpa blokir sebesar Rp. 11.683.494.000,- (Sebelas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Pada Bulan ini pagu anggaran yang dapat dikelola masih hanya anggaran Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran;
3. Bulan April 2025, dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Ri Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari dan telah ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tanggal 21 April 2025, maka proses perubahan dan penyesuaian organisasi telah selesai. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dilakukan pembukaan blokir sekaligus pemotongan anggaran. Selain itu pada revisi ini juga terdapat realokasi penambahan anggaran sehingga pagu BPHL Wilayah XV sebesar Rp. 13.453.692.000,- (Tiga belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

4. Bulan Agustus 2025, dilaksanakan penambahan pagu anggaran pada Kegiatan 7283.BDG. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sebesar Rp. 75.000.000,- sehingga pagu anggaran BPHL Wilayah XV menjadi sebesar Rp. 13.528.692.000,- (Tiga belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. Bulan November 2025, dilaksanakan revisi pemenuhan kekurangan belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp. 620.750.000,- (Enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pagu anggaran BPHL Wilayah XV menjadi Rp. 14.149.442.000,- (Empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran kinerja juga tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 tentang Standar Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang menjelaskan bahwa capaian RO, nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen).

III. RENCANA KERJA TAHUN 2026

A. STRATEGI MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 mengangkat visi pembangunan nasional "Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045" dengan mengusung 8 (delapan) misi *Asta Cita* yang selanjutnya disebut Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1) Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2) Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;

3) Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4) Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

5) Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6) Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7) Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;

8) Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Gambar 4. Prioritas Nasional 2025-2029

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru". Strategi Ditjen PHL dalam mendukung Prioritas Nasional (PN2) dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola tapak, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi produksi hasil hutan yang didukung oleh peredaran hasil hutan yang tertib, hilirisasi industri hasil hutan melalui legalitas kayu serta penguatan UMKM kehutanan.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dengan melakukan pendekatan dengan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi melalui pendekatan 5 (lima) pilar pengelolaan hutan

lestari. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk meningkatkan PNBP, ekspor, pasar domestik, penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Langkah korektif dalam menghadapi permasalahan pengelolaan hutan lestari adalah antara lain :



Gambar 5. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2026

Perwujudan pengelolaan hutan lestari yang adaptif, inklusif, dan produktif untuk mengalirkan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi bagi pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dijumpai melalui 5 (lima) sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi;
2. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan Masyarakat sekitar hutan;

3. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional;
4. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
5. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2026

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Target Tahun 2026
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	856.000 juta hektar
		2. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat	11 Milliar Rupiah
		3. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	1. Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	71 %
			2. Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	60 %
			3. Nilai investasi sektor kehutanan	0.48 Triliun Rupiah
			4. Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	13,05 Miliar USD
			5. Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	500 ribu ton
6. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi	2,84 Triliun Rupiah			

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Target Tahun 2026
2	Dukungan Manajemen	1. Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	1. Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	3,85 poin
		2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	1. Nilai SAKIP Ditjen PHL	77 poin

Sumber : Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2026.

Pencapaian kinerja Ditjen PHL dalam upaya pengelolaan hutan tidak lepas dari peran serta dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat lintas Eselon I Kementerian Kehutanan, lintas kementerian/Lembaga, pihak swasta (unit manajemen), NGO Lembaga Donor, akademisi, sampai dengan masyarakat. Pada lingkup BPHL Wilayah XV juga terbentuk *crosscutting* berbagai pihak seperti Es. III lingkup Kemenhut, Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), pihak swasta, unit usaha kehutanan dan masyarakat. Gambaran *crosscutting* dalam lingkup Ditjen PHL dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 8 berikut.



Gambar 6. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL



Gambar 7. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL

Tabel. 8 Matriks Pemetaan Peran (Crosscutting) dalam Pencapaian Kinerja BPHL Wilayah XV

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1. Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif 2. Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	Dit. BRPH, KPH, PSKL, Dishut Prov. KTH, PBPH	Bersinergi aktif dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH	Dit. PUPH, BPKH, Dishut Prov, KTH, PBPH	Bersinergi aktif dalam mempertahankan fungsi ekologis hutan dan menghasilkan sumberdaya yang berkelanjutan

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH	Dit.PUPH, PBPH, PSKL, BKSDAE, Dishut Prov, KTH	Berperan aktif dalam peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan
	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku 2. Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log 3. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK 	Dit.BPPHH, DPR RI, Lembaga Sertifikasi, Dishut Prov, KPH, PBPHH	Berperan aktif dalam upaya peningkatan produksi olahan hasil hutan dan upaya peningkatan nilai ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat LK
		Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus	Dit.BPPHH, PSKL Dishut Prov, KPH, KTH, PBPH, PBPHH	Berperan dalam upaya peningkatan PNBPN dan penertiban PUHH
		Nilai investasi sektor kehutanan	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan 2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan 	Dit. BUPH, PSKL, BPKH, Dishut Prov, KPH, PBPH	Berperan dalam upaya peningkatan usaha sektor kehutanan dan peningkatan PNBPN

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
		Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan	Dit. BPPHH, PBPHH, DPR-RI, Lembaga Sertifikasi, PSKL PBPH, PBPHH	Berperan dalam upaya peningkatan usaha sektor kehutanan dan peningkatan PNBP
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (Dit. PUPH)	Dit. PUPH, PSKL, BPKH, PBPH	Berperan aktif dalam upaya peningkatan PNBP
		Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK 2. Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK 	Dit. PUPH, PSKL, BPKH, PBPH, BPDASRH	Berperan aktif dalam upaya peningkatan PNBP
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan WB dari pemanfaatan hutan 2. Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP 3. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai RKT 4. Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja 	Dit. IPHH, PBPH, KPH, KTH, PSKL, BP2SDM, KPKNL, Akademisi,	Berperan dalam upaya peningkatan PNBP dan penertiban PUHH

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
Dukungan Manajemen	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Meningkatnya nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL	PHL, SEKDJITJEN, ITJEN	Bersinergi dalam meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, birokrasi, pelaporan yang lebih baik, efektif, efisien dan bertanggung jawab
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Meningkatnya nilai SAKIP Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL	PHL, SEKDJITJEN, ITJEN	

Dalam mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan ***“Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen”*** dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
2. Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
4. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5. Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Adapun Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XV disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Matriks Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
A	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
1	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (persen) (Dit. BRPH)	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	KPH yang masuk kategori efektif	3 Lembaga	675.000.000
					Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (peta arahan) (Dit. BRPH)				
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (ribu hektar) (Dit. PUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	4 Badan Usaha	69.000.000
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai Transaksi Ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan Masyarakat	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (kelompok masyarakat) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	1 Badan Usaha	190.000.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
3	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung & produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai Efisiensi Pemanfaatan Bahan Baku menjadi Kayu Olahan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (persen) (Dit. BPPHH)				
					Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (ribu ton) (Dit. BPPHH)				
					Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (juta m ³) (Dit. BPPHH)	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah	11 Badan Usaha	463.000.000
		Peningkatan Rasio Serapan Getah Pinus ke Industri Pengolahan Dalam Negeri	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (ribu ton) (Dit. BPPHH)				

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
		Nilai investasi sektor kehutanan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (persen) (Dit. BUPH)	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	3 Badan Usaha	250.000.000
					Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (triliun rupiah) (Dit. BUPH)				
		Nilai Ekspor Produk Kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (juta ton) (Dit.BPPHH)	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	3 UMKM	520.000.000
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (juta m ³) (Dit.PUPH)	QIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	4 Badan Usaha	330.000.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	175.000.000
					Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Badan Usaha	170.000.000
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (persen) (Dit. IPHH)				
					Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP (poin) (Dit. IPHH)				
					Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (persen) (Dit. IPHH)				

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
					Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Persen) (Dit.IPHH)	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan	2 Badan Usaha	450.000.000
B	Dukungan Manajemen								
1	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Laporan	5.000.000
						EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Poin	10.891.260.000
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Poin	31.000.000
						EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	5.868.000

POHON KINERJA BPHL WILAYAH XV TAHUN ANGGARAN 2026

**SASARAN
KEGIATAN**

**SASARAN
KEGIATAN**

**SASARAN
KEGIATAN**

**SASARAN
KEGIATAN**

**SASARAN
KEGIATAN**

**SASARAN
KEGIATAN**

**SASARAN
KEGIATAN**

**SASARAN
KEGIATAN**

Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Optimalisasi pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengendalian pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dalam mendukung fungsi ekologis

Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi

Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional

Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global

Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan

Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBK dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung

R I N C I A N O U T P U T

Nilai SAKIP DITJEN PHL
(76 Poin)

Nilai Maturitas SPIP
DITJEN PHL (Level 3,8)

Fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari
(3 Lembaga)

Penanaman hutan oleh BPBH/ Hak Pengelolaan (4 Badan Usaha)

Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi (1 badan Usaha)

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (1 Badan Usaha)

Produksi kayu bulat berkelanjutan
(4 Badan Usaha)

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
(1 Badan Usaha)

UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL (3 UMKM)

Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (BPBPH)
(11 Badan Usaha)

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha
(3 Badan Usaha)

Pengawasan dan Pengendalian n Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (2 Badan Usaha)

Tahun 2026 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun 2026 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor urut Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-143.06.2.693529/2026 Tanggal 1 Desember 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 14.690.674.000,- (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pada Bulan Desember 2025, dilaksanakan revisi anggaran terhadap pagu Tahun 2026. Revisi ini dilaksanakan dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 atas arahan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang berdasar pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Tindak lanjut atas surat S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 (tentang Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026). Pemenuhan Direktif Presiden ini terdiri dari blokir dana yang bersumber dari PNPB dan pemotongan dana yang bersumber dari RM sebesar Rp. 315.546.000,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Setelah revisi, pagu anggaran BPHL Wilayah XV menjadi Rp. 14.375.128.000,- (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Rupiah Murni (RM) : Rp. 10.935.128.000,-.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Rp. 3.442.000.000,-.

Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 10. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XV Tahun 2026

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Target		Ket
		Fisik	Keuangan	
143.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
7279	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3 Lembaga	675.000.000	
7279.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	3 Lembaga	675.000.000	
7280	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3 Badan Usaha	250.000.000	
7280.QIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	3 Badan Usaha	250.000.000	Prioritas Nasional

7281	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 Badan Usaha	1.084.000.000	
7281.QDH.003	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	175.000.000	Prioritas Nasional
7281.QDH.004	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha	190.000.000	
7281.QIH.001	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	4 Badan Usaha	330.000.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.002	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha	320.000.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.003	Penanaman Hutan oleh PBPH/ Hak Pengelolaan	4 Badan Usaha	69.000.000	Prioritas Nasional
7282	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	450.000.000	
7282.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	2 Badan Usaha	450.000.000	
7283	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1 UMKM	983.000.000	
7283.BDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	3 UMKM	520.000.000	
7283.QDH.002	Pembinaan Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Kecil dan Menengah	11 Badan Usaha	463.000.000	Prioritas Nasional
143.06.WA	Program Dukungan Manajemen			
7317.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	2 Layanan	11.248.674.000	
7317.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	5.000.000	
7317.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	31.000.000	
7317.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10.891.260.000	
7317.EBD.953	Layanan Pemantauan Evaluasi	1 Dokumen	5.868.000	
Jumlah			14.375.128.000	

Sumber : RKAKL BPHL Wilayah XV Tahun 2026 (Revisi I Tanggal 23 Desember 2025).

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan dan pencapaian rincian output kegiatan, BPHL Wilayah XV Makassar melaksanakan upaya-upaya pencapaian melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Implementasi kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari melalui kegiatan (1) Pendampingan dan Pembinaan KPH dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJPD melalui SI-RPHJP KPH dan Penguatan Kelembagaan KPH; (2) Fasilitasi dan Penguatan KPH dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dengan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi KPH. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH).

2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Implementasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui Kegiatan (1) Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan dengan kegiatan pembinaan teknis/fasilitasi pengajuan PBPH/ penyusunan koordinat geografis, Sosialisasi teknis/fasilitasi pengajuan PBPH/penyusunan koordinat geografis. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH).

3. Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Implementasi dilaksanakan dengan Kegiatan (1) Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui kegiatan fasilitasi pengembangan multiusaha kehutanan yang terdiri dari kegiatan percepatan, pengendalian dan implementasi multiusaha kehutanan, *Focus Group Discussion* pengembangan multiusaha kehutanan pada PBPH; (2) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi melalui kegiatan fasilitasi/pembinaan kemitraan konsesi yang terdiri dari kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja PBPH utamanya pada isu kelola sosial (pemberdayaan/kerjasama dengan masyarakat), fasilitasi/pembinaan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan kehutanan/kemitraan konsesi; (3) Kegiatan Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan kayu; (4) Kegiatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui Kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu (kegiatan pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan bukan

kayu/multiusaha kehutanan dan pengembangan produk HHBK) dan Kegiatan Pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi getah pinus (kegiatan monitoring dan evaluasi produksi getah pinus dan bimbingan teknis peningkatan produksi getah pinus dalam rangka hilirisasi getah pinus; (5) Kegiatan Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman (kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman pada PBPH/hak pengelola). Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH).

4. Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Implementasi dilaksanakan dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tertib PNBPN, PUHH serta rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga profesional, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan PUHH melalui kegiatan (1) Peningkatan kapasitas aktor PUHH/PNBPN (GANISPH); (2) Monitoring dan evaluasi PNBPN pemanfaatan hutan dan (3) Kinerja Tenaga Teknis, Monitoring dan Evaluasi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH).

5. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan (1) UMKM kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL melalui inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan, Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Bimbingan Teknis Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM kehutanan bersama Komisi IV DPR; (2) Kegiatan Pembinaan Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Kecil dan Menengah melalui kegiatan Fasilitasi usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah, Bimbingan teknis peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah dan kegiatan Pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja PBPHH skala kecil dan menengah. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH).

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengelolaan Hutan Lestari

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan pemberian layanan berupa (1) Layanan BMN berupa kegiatan rekonsiliasi BMN lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari; (2) Layanan umum berupa pelaksanaan kegiatan rencana program dan anggaran, penyediaan data dan informasi, pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan penilaian SAKIP dan penilaian level maturitas SPIP; (3) Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor; (4) Layanan Pemantauan dan Evaluasi berupa kegiatan rapat pemantauan dan evaluasi kinerja. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Sekditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 ini dibuat sebagai dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 disusun berdasarkan kepada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2026.

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran dan identifikasi rencana yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dalam Tahun 2026. Pelaksanaan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV diharapkan dapat memberikan hasil yang mendukung prioritas pembangunan pemerintah, mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan secara baik dan bertanggungjawab sehingga dapat meningkatkan produktifitas hutan dan kesejahteraan masyarakat.